



# LAPORAN EVALUASI PENGADUAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

++  
++  
++  
++

20  
24

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 75, Purwokerto Selatan



53141



(0281) 635220



dindikbanyumas



<https://dindik.banyumaskab.go.id>

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1    Latar Belakang	2
1.2    Landasan Hukum	2
1.3    Maksud dan Tujuan	3
1.4    Unsur Pengaduan	3
<b>BAB II</b>	<b>4</b>
<b>KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>4</b>
2.1    Mekanisme Pengaduan	4
2.2    Tim Pelaksana	4
2.3    Waktu Pelaksanaan	4
2.4    Media Pengaduan	5
2.5    Pelaksanaan Penangan Pengaduan Masyarakat	5
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>HASIL DAN TINDAK LANJUT</b>	<b>6</b>
3.1    Monitoring Pengaduan Masyarakat	6
<b>BAB IV</b>	<b>7</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>7</b>
4.1    Kesimpulan	7
4.2    Saran	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, maka Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata dari amanat undang-undang tersebut.

Sejauh ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih dirasakan belum memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan langsung maupun melalui media elektronik (whatsapp, email, instagram, X dan lain-lain). Apabila aduan tersebut tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan dampak buruk terhadap pemerintah yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, maka perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang teratur terhadap penanganan pengaduan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Evaluasi Pengaduan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah memberikan gambaran data dan informasi terkait jumlah penanganan pengaduan perizinan yang masuk dan pengaduan prioritas gratifikasi dan Pungutan liar serta tindak lanjut dari hasil pengaduan tersebut sesuai ketentuan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan monitoring dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan perizinan serta pengaduan prioritas yang perlu ditindak lanjuti segera dan perlu perbaikan layanan pengaduan kepada masyarakat kedepannya selama bulan berjalan.

### 1.4. Unsur Pengaduan

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

2.1. Mekanisme Pengaduan

Proses pelaksanaan Penanganan Pengaduan adalah sebagai berikut :



2.2. Tim Pengelola

Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas masuk dalam Tim Pengelolaan Pengaduan Dinas Pendidikan Nomor 067/237/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Tim Pengelolaan Pengaduan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

2.3 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terhitung tahun 2024, sebagai upaya untuk mengakomodir semua Laporan Pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### **2.4. Media Pengaduan**

Media yang digunakan untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yaitu melalui beberapa kanal Lapak Aduan Banyumas seperti *Whatsapp, Facebook, Instagram, X, e-mail, SP4N-LAPOR!, LaporGub* kemudian bisa melalui kotak aduan yang tersedia diteras lobby dan *google form* yang terdapat di website resmi Dinas Pendidikan.

#### **2.5. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait layanan dibidang pendidikan serta berkomitmen untuk menangani seluruh aduan masyarakat yang masuk melalui media pengaduan yang disediakan. Secara umum, layanan pengaduan perizinan yang masuk dan ditindaklanjuti selama tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

## **BAB III**

### **HASIL DAN TINDAKLANJUT**

#### **3.1. Monitoring Pengaduan Masyarakat**

Berikut Rekap Penyelesaian Pengaduan Tahun 2024 yang masuk melalui berbagai kanal aduan :

REKAP PENYELESAIAN PENGADUAN TAHUN 2024

No	Nama Pelapor	Inti pengaduan	Tanggal masuk pengaduan	Tindak lanjut pengaduan	Tanggal penyelesaian pengaduan	Status laporan pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
BULAN JANUARI							
1	#w2400000106	Terdapat kartu angsuran yang disebutkan sumbangan tapi dari pihak sekolah mennentukan nominal 300.000 dan mengatasmamakan Komite, SD N Ajibarang Wetan	09/01/2024	Setelah konfirmasi dengan pihak sekolah, kartu angsuran yg dimaksud merupakan keputusan mutlak dari komite dan pihak sekolah tidak mengetahui sistem sumbangan yg ditetapkan. Sekolah sama sekali tidak mengatasmamakan komite. Alangkah baiknya jika Saudara juga berkenan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak komite maupun sekolah agar informasi yg didapatkan lebih jelas. Jika ada yg berbunyi sumbangan namun nominalnya ditentukan, hal tersebut tidak dibenarkan.	15/01/2024	Selesai	4 hari

2	#w2400000109	Di SMP Negeri apakah boleh dilakukan jual beli buku, seragam, iuran pembangunan gedung (SMP N Gumelar)	09/01/2024	Aduan yang disampaikan berupa screenshot adanya bazar buku pendamping berupa LKS yang diakan oleh koperasi sekolah, tidak ada anjuran/ kewajiban untuk harus membeli buku. Aduan telah dikonfirmasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan bahwa pembelian seragam juga tidak bersifat wajib serta iuran pembangunan gedung bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah, komite dan wali murid.	15/01/2024	selesai	1 hari
3	#w2400000134	Untuk SMP N 1 Sumbang dan sekitarnya agar siswa tidak menggunakan sepeda motor, mohon sekolah tindak tegas bagi siswa yang menggunakan sepeda motor dengan tidak mematuhi aturan	12/01/2024	Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan surat edaran larangan siswa SMP menggunakan sepeda motor. Kami juga bekerja sama dengan Kepolisian serta secara rutin mengadakan sosialisasi berlalu lintas.	15/01/2024	selesai	2 hari

4	#w2400000194	di SMP Negeri dan SD Negeri apakah diperbolehkan melakukan pungli dan menjual belikan buku, seragam, iuran pembangunan, infak	13/01/2024	Berdasarkan Surat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 420/4463 tanggal 17 Juli 2023 tentang Larangan Pungutan pada Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan dlm bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Tindakan sdh sering kami lakukan. Berkenaan dengan apa yg saudara sebutkan di atas, mohon dicek dulu apakah benar sekolah menjual belikan buku, menarik iuran, dll. Lebih baik jika saudara tanyakan kepada sekolah dahulu. Jika berkenan, mohon disebutkan SMP/SD mana disertai bukti yg cukup untuk kami TL.	14-Jan-24	selesai	1 hari
---	--------------	---	------------	--	-----------	---------	--------

5	#w2400000194	Berapa jatah buku paket/panduan untuk sekolah dasar di tiap desa di kab.banyumas? Sebab di tempat saya setiap semester pasti diwajibkan membeli buku oleh pihak sekolah dengan alasan buku paket tidak mencukupi untuk dipinjamkan ke siswa, padahal di daerah saya itu tidak lebih dari 30 siswa terutama siswa kelas VI	15/01/2024	Untuk buku paket/panduan, Dinas Pendidikan tidak memberikannya, karena memang tidak ada kebijakan untuk itu. Sesuai Permendikbudristek nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOSP, sekolah dapat menyediakan anggaran untuk pengadaan buku teks pelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan. Orang tua boleh memberikan sumbangan kepada sekolah sesuai kemampuan. Demikian terima kasih.	17/01/2024	selesai	2 hari
6	#f2400000257	sekolah SD yg melaksanakan kegiatan wisata SD utk siswa kls 6.. dan membayar biaya perpisahan utk kenang2an sebesar 500 ribu.. yg cukup memberatkan orgtua/wali murid.. Wisata ke Yogya per siswa 400 ribu, jika dgn ortu/wali/pendamping jadi 800 ribu.. belum untuk uang saku/sangu berkisar 1 juta lebih..hal tsb banyak mmeratkan orgtua murid yang sebagian tidak mampu karena kalah suara dlm kesepakatan bersama/musyawarah.. terpaksa harus ikut suara org2 yg mampu.yg tidak mampu hanya diam dan pusing mikir uang tersebut.. Mohon ada solusi dari dinas pendidikan atau dinas terkait di wilayah kab banyumas. SD N Ciberung 2 ajibarang	19/01/2024	Telah ditindaklanjuti berupa berita acara hasil musyawarah sekolah dengan wali murid, komite sekolah, dan seluruh guru yaitu kegiatan wisata kelas VI dengan biaya Rp.395.000 bersifat tidak wajib, kegiatan perpisahan diserahkan sepenuhnya ke wali murid, kenang-kenangan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan biaya sebesar Rp.225.000, rencana kenang-kenangan yang diberikan dari komite akan digunakan untuk membantu perbaikan paving halaman sekolah yang sudah rusak.	19/01/2024	selesai	3 jam

7	#w2400000368	NISN anak tidak ditemukan atas nama Aditya Rifqi Hamizan, TK Arivananda, Bekasi	31/01/2024	Terima kasih atas pertanyaan yang masuk ke Dinas Pendidikan, Bpk/Ibu Yth ; -NISN aktif/tidak aktif tidak terkait dengan NIK -Dimungkinkan tidak aktif karena operator sekolah yang baru menginput data secara manual (tidak melalui penarikan data) sehingga muncul NISN baru yang berakibat NISN lama dinonaktifkan dari sistem	31/01/2024	selesai	4,5 jam
BULAN FEBRUARI							
8	#G2400000036	58 guru di Kabupaten Banyumas belum nenerima Tunjangan Profesi Guru Triwulan 4 di Kabupaten Banyumas	05/02/2024	Pencairan TPG PPPK terkendala pada sistem pusat dan masih dalam pembenahan sistem, sehingga pencairan carry over ditahun 2024 mengalami keterlambatan. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas Pendidikan selalu berupaya keras agar hak-hak bapak/ibu guru segera terpenuhi.	05/02/2024	selesai	6 jam

9	#w2400000456	Sekolah Dasar Negeri apakah memperbolehkan adanya DPM (Dana Partisipasi Masyarakat), proyek keramik tempat parkir tidak dicover oleh dana BOS	07/02/2024	Berdasarkan Permendikbud Ristek no 63/2022 ttg Juknis BOSP, salah satu komponen penggunaan dana BOSP adalah digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras sesuai ketentuan (lihat lampiran berikut). Sekolah tidak diperbolehkan adanya pungutan, namun diperbolehkan menerima sumbangan sukarela, tidak ada unsur paksaan, tidak ditentukan jumlah dan waktunya.	12/02/2024	selesai	5 hari
10	#l2400000032	Pencairan honor APBD SD dari Januari-Februari belum ada informasi	12/02/2024	Informasi terbaru SK honor untuk para guru dan tendik yang alokasi honorinya dari APBD sudah berada ditahap pengajuan ke Bupati dan sekarang masih dalam proses koreksi oleh Bagian Hukum Setda	12/02/2024	selesai	10 jam

11	#i2400000290	Oknum sekolah rajin pungli, setelah PIP cair sekolah meminta uang 50 ribu dan diwajibkan infak, SDN 2 Banteran Sumbang	20/02/2024	Berdasarkan klarifikasi SDN 2 Banteran, berikut jawaban Kepala SDN 2 Banteran terhadap aduan di lapak. Berkenaan dengan PIP Berdasarkan rapat sosialisasi wali murid penerima PIP pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 10.37 WIB bahwa wali murid penerima PIP bersepakat akan menyumbangkan sebagian kecil rejeki yang diterima seikhlasnya tanpa ada unsur paksaan untuk pengecatan gedung perpustakaan. Ide ini muncul karena orang tua menginginkan perpustakaan sebagai tempat belajar anak agar lebih representatif sehingga anak betah di perpustakaan.	21/02/2024	selesai	1 hari
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	--------



14	#f2400000862	Anak sekolah wajib menonton film TEGAR, ada surat edaran dari Dinas Pendidikan	04/03/2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak mewajibkan dan tidak mengeluarkan surat edaran untuk menonton film Tegar	04/03/2024	selesai	10 menit
15	#l2400000064	Mohon informasi terkait pencairan honor APBD dari Januari sampai Maret, kebutuhan tanggungan sudah banyak	06/03/2024	Honor sudah di tahap pengajuan kepada Bupati dan sedang proses koreksi oleh Bagian Hukum Setda. Jika proses tersebut selesai, tahap selanjutnya yaitu pengajuan ke Bagian Keuangan.	06/03/2024	selesai	2 jam 10 menit
16	#l2400000066	Pencairan 50% THR dan 50% TPG tahun 2023 bagi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, untuk yang kemarin sudah cair itu apakah merupakan gabungan keduanya (50%THR dan 50%TPG) atau baru salah satunya ya? Kalau baru salah satunya, kapan kiranya yang satunya cair?	06/03/2024	50 % yang sudah disalurkan adalah THR, berkenaan dengan pertanyaan Saudara kami Dinas Pendidikan sedang berupaya berkordinasi dengan kementrian keuangan perihal kekurangan anggran utk pembayaran 50% tunjangan profesi dan hari ini akan dilaksanakan zoom perihal tsb dg kementerian keuangan.	07/03/2024	selesai	17 jam

17	#f2400000963	Pendidikan jenjang SD sampai SMP Negeri Pemkab masih ada pungutan dan infak tapi ada nominal yang ditentukan. Katanya sekolah gratis, tapi hanya slogan	13/03/2024	Sesuai program Pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun bahwa program tersebut terus akan berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP. Perlu disyukuri bahwa Pemerintah telah membantu biaya Pendidikan kepada rakyatnya. Biaya pendidikan disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih bersifat terbatas untuk memenuhi kebutuhan minimum sekolah. Bahkan bagi siswa yang tidak mampu dan memenuhi syarat, Pemerintah menggulirkan KIP dan KBP. Diperlukan alokasi anggaran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat agar sekolah-sekolah semakin kuat dan berkualitas.	15/03/2024	selesai	2 hari
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	--------

				Namun demikian, biaya pendidikan tidak boleh memberatkan orang tua/ wali murid. Mendikbud dengan tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada mereka. Jika ditemukan pungutan, alangkah bijaknya jika Anda sebutkan nama sekolah dan komunikasikan dengan sekolah. Berikan masukan yg positif bagi sekolah. Sekolah adakan infak dsb apabila dikomunikasikan dengan baik akan berdampak positif.			
18	#w2400000861	Saya penjaga sekolah WB, honor Tendik APBD belum cair sudah 2 bulan lebih, sudah hampir 3 bulan tidak berpenghasilan	13/03/2024	Proses yang dilalui SK revisi tidak hanya satu kali karena data yang diberikan harus sesuai dan valid, tahap berikutnya diajukan ke TU Bupati. Hari Jumat selesai, minggu depan bisa dilakukan pencairan	13/03/2024	selesai	1 jam 6 menit
19	#w2400000914	Dinas terkait mohon informasi gaji ke-13 dan 50% TPG Tahun 2023	18/03/2024	50% gaji ke 13 sudah cair ke masing-masing rekening penerima dan untuk 50% TPG masih dalam proses yang tidak lama lagi akan diterimakan	19-Mar-24	selesai	1 hari

20	#w2400000972	Di SMP 3 Kalibagor biaya perpisahan sangat memberatkan, tolong dilaksanakan secara sederhana tidak perlu di hotel	23/03/2024	Perpisahan adalah kegiatan internal sekolah yang ide dan seperti apa pelaksanaan biasanya ditentukan oleh siswa/orang tua siswa, yang kemudian dikomunikasikan dengan komite/sekolah. Jika memang dirasa memberatkan sebaiknya dikomunikasikan dengan komite/sekolah, agar ada solusi yang baik. Dinas pendidikan setiap tahun selalu menghimbau agar kegiatan perpisahan dilaksanakan secara sederhana, disesuaikan kemampuan dan tidak memberatkan orang tua.	23/03/2024	selesai	47 menit
BULAN APRIL							

21	#w2400001077	Pemberian kenang-kenangan berupa barang kepada wali kelas atau guru, meski tidak ada kewajiban, termasuk gratifikasi	04/04/2024	Perlu diketahui bahwa Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan peraturan khusus mengenai hal tsb. Pemberian barang/sembako yg diberikan oleh wali murid kepada guru merupakan salah satu bentuk apresiasi. Namun begitu kembali lagi pada kebijaksanaan dan kesepakatan baik antar yang memberi dan yang diberi. Yang perlu di garis bawahi bahwa hal tersebut tidak bersifat wajib dan memaksa, apabila memberatkan salah satu maupun beberapa wali murid, maka tidak perlu memberikan barang/sembako atau yg sejenisnya.	04/04/2024	selesai	11 jam
22	#w2400001147	Bantuan KIP jenjang SMP tidak setiap tahun mendapatkan bantuan tersebut, SMP N 3 Pekuncen	16/04/2024	Berkenaan dengan KIP tahun 2024, SK pemberian dan SK nominasi baru keluar beberapa tahapan dan proses pencarian baru dapat dicairkan mulai 16 April 2024. Proses penerimaan KIP setiap tahunnya secara bertahap sampai bulan Desember. Untuk itu mohon bersabar karena penentu penerima KIP adalah dari Puslapdik.	17/04/2024	selesai	1 hari

23	#w2400001252	Di SMP selalu mengadakan study tour, biaya per anak 1.2 juta, apakah wajib	25/04/2024	<p>Study tour merupakan salah satu upaya sekolah dalam memperkenalkan isi pembelajaran pada siswa sehingga siswa akan bertambah wawasan terhadap apa yg dipelajari dan dikunjungi.</p> <p>Study tour bukan kewajiban bagi sekolah untuk mengadakannya, namun study tour membantu memperkaya referensi bagi anak.</p> <p>Bagi sekolah yg menyelenggarakannya, tentu membutuhkan biaya. Di sinilah perlunya gotong royong antara sekolah dan walimurid. Antara sekolah dan walimurid bermusyawarah menentukan objek dan anggaran yg dibutuhkan.</p> <p>Sekali lagi, study tour bukan hal wajib, namun jika sekolah menyelenggarakan haruslah dimusyawarahkan, sehingga tidak memberatkan walimurid.</p>	25/04/2024	selesai	2 jam 25 menit
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	----------------

24	#f2400001517	Apakah masih diijinkan acara perpisahan di jenjang TK, SD, SMP, SLTA dengan acara wisuda yang memberatkan orang tua siswa	30/04/2024	Membaca Surat Edaran Sekjen Kemdikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 400.3.11/2350 tanggal 18 Maret 2024, disebutkan bahwa memastikan satuan pendidikan satuan PAUD, Dikdasmen (SD-SMP-SMA) tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik. kegiatan pada satuan pendidikan agar melibatkan komite sekolah dan orang tua.	30/04/2024	selesai	3 jam 21 menit
----	--------------	---	------------	--	------------	---------	----------------

25	#w2400001306	SMPN 3 sumbang tolong d respon cepat tadi kami habis kumpulan d sekolah ternyata pembahasan seputar uang karena kami habis menerima PIP jdi sekolah terus mengadakan pertemuan walmur, ada pungutan yg mengatasmakan infak kelas 7 @RP 750000 kelas 8 @Rp 600000 dn kelas 9 @Rp 450000 sedangkan baru kemarin ada pungutan mengatasmakan utk perpisahan dn sejenisnya aja Rp 375000 (khusus kls 9) dan membahas WC jg yg sya tau SDH d resmikan sma BPK kadikbud Ahir tahun 2023 "	30/04/2024	<p>Perlu diketahui beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, segala macam Pungutan dilarang, namun Sekolah boleh menerima sumbangan dari masyarakat.</li> <li>2. Sekolah tidak boleh menahan ijazah karena alasan keuangan. Aduan telah ditindaklanjuti yaitu dengan penjelasan kembali oleh pihak sekolah kepada wali murid.</li> </ol>	30/04/2024	selesai	3 jam 30 menit
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	----------------

		Dn tdi jg ada guru yg menceletuk Kulo uang infak atau apapun blm lunas nantinya tdk bisa ambil ijazah" mungkin saya tdk ada bukti akurat atau bukti secara tertulis tpi kami mohon kepada pihak dinas pendidikan untuk segera dengan cepat merespon, ada jg yg ijasah tahun 2017 blm d ambil karena pembayaran blm lunas itu fakta d lapangan, apa karena kami orang desa dn bodoh jadi sekolah banyak menuntut tdk dgn sekolah d kota purwokerto karena saya sudah cek dengan wali murid SMPN 8 purwokerto tdk ada pungutan apapun TPI kami yg di desa SMPN tpi banyak tuntutan pembayaran Terimakasih mohon maaf bila ada kata2 yg menyinggung Kami mewakili wali murid yg tdk berani bersuara					
BULAN MEI							
26	#G2400000098	TPG Kabupaten Banyumas 2024 triwulan 1 belum dicairkan,	07/05/2024	Bukan hanya Kab.Banyumas tapi Kabupaten se-Indonesia belum ada yg cair karena di pusat masih berporses dan diperkirakan bisa tersalur ke daerah sekitar 14 hari kerja ke depan, mohon ditunggu dan mohon maklum.	07/05/2024	selesai	3 jam 21 menit

27	#f2400001642	Sejak kelas 1 anak saya tidak pernah mendapat PIP a.n. Hafids Revan Saputra, SD Negeri 1 Karanggude	12/05/2024	Siswa nama Hafids Revan Saputra sudah kami cek di usulan PIP, semua usulan PIP lewat usulan dari sekolah melalui Dapodik masing2 sekolah, monggo untuk orang tua siswa untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk dapat diusulkan PIP namun sekolah harus benar2 teliti dalam pengisian persyaratan PIP sehingga ketika data dapodik ditarik Kementrian untuk siswa yg diusulkan PIP dapat disetujui karena persyaratannya lengkap dan benar	14/05/2024	selesai	2 hari
----	--------------	---	------------	--	------------	---------	--------

28	#w2400001434	Aduan agar pemkab memberikan surat edaran tentang larangan pelaksanaan stoudytour ke luar kota	14/05/2024	Izin kami sampaikan kegiatan outing class merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas, peserta didik diajak untuk belajar dengan melihat secara langsung obyek-obyek/sumber belajar, sifatnya sukarela, tidak wajib, tidak memberatkan orang tua/wali. Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan panduan berkenaan dengan pembelajaran di luar kelas SD dan SMP di Kabupaten Banyumas Nomor 420/10757/2023 tanggal 15 November 2023 yang berisi rambu-rambu serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan outing class.	14/05/2024	selesai	7 jam
29	#G2400000103	Adanya pungutan sumbangan pembangunan gedung kelas baru di SMPN 1 Somagede Banyumas	16/05/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dan pelapor melakukan klarifikasi bahwa aduan yang dilaporkan tidak benar, dibuat atas kesadaran yang bersangkutan tanpa ada tekanan dari mana saja.	20/05/2024	selesai	4 hari

30	#w2400001463	Acara perpisahan sekolah di gedung tidak diperbolehkan padahal sudah membayar angket, merasa sangat kecewa	16/05/2024	Sebagaimana surat edaran Kadindik no 400.3.5.1/3963/2024 tgl 14 Mei 2024, surat ini sifatnya himbauan, jika memang telah memenuhi prinsip2 sebagai mana SE, dan telah melibatkan komite dan orang tua serta tidak memberatkan, maka pelaksanaan dikembalikan kepada kebijakan penyelenggara/sekolah.	16/05/2024	selesai	10 menit
31	#w2400001472	Tidak setuju adanya perpisahan, karena bersifat hura hura, kurang bermanfaat, keuangan orang berbeda beda	16/05/2025	Sebagaimana surat edaran Kadindik no 400.3.5.1/3963/2024 tgl 14 Mei 2024, surat ini sifatnya himbauan, jika memang telah memenuhi prinsip2 sebagai mana SE, dan telah melibatkan komite dan orang tua serta tidak memberatkan, maka pelaksanaan dikembalikan kepada kebijakan penyelenggara/sekolah.	16/05/2024	selesai	1 jam
BULAN JUNI							

32	#G2400000121	Mohon dicek adanya penarikan uang administrasi semester dan infak tanpa tanda tangan kepala sekolah di SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Patikraja	03/06/2024	Telah ditindaklanjuti dan konfirmasi oleh Pengawas/Korwilcam dengan pihak sekolah dan komite, perlu diketahui bahwa tidak ada penarikan uang administrasi semester. Iuran Pramuka dan infak pembangunan merupakan inisiatif yg walimurid melalui komite yg digunakan untuk pembangunan musola. Pihak sekolah tidak terlibat sehingga tidak ada tanda tangan KS.	03/06/2024	selesai	53 menit
33	#f2400001997	Tolong kalau masuk sekolah dasar agar tidak ada tes membaca dan menulis	12/06/2024	Sekolah Dasar di Kabupaten Bnayumas dipastikan tidak ada tes baca tulis pada saat PPDB. Hal ini karena tes baca tulis hitung telah dilarang melalui Permen Nomor 17 tahun 20210 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada Juknis PPDB 2024 terbaru pun hal tersebut juga telah diatur. Terima kasih	13/06/2024	selesai	1 hari

34	#w2400001730	Agar dilakukan evaluasi sistem yang ada di SMPN 2 Gumelar dengan memaksimalkan pengawasan dan pembinaan sekolah	19/06/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan hasil kesepakatan secara kekeluargaan antara pihak sekolah dan orang tua siswa serta peningkatan camera pemantau dan pengawasan lingkungan sekolah baik eksternal maupun internal	24/06/2024	selesai	5 hari
35	#f2400002042	Pendaftaran siswa baru jangan menjadi ajang bisnis, biaya sumbangan jutaan, adanya sekolah unggulan dengan nilai yang tinggi membuat peluang siswa disekolah biasa yang nilai 80 ke atas tidak bisa diterima.	19/06/2024	<p>Perlu diketahui bahwa saat ini tidak ada istilah sekolah unggulan. Semua sekolah diharapkan mempunyai kualitas yang sama sehingga tujuan PPDB dengan jalur zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan.</p> <p>Untuk jalur PPDB ada 4 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi</li> <li>2. Afirmasi</li> <li>3. Mutasi</li> <li>4. Prestasi</li> </ol> <p>Untuk anak yg menurutnya mau masuk sekolah yang di luar zona dapat memilih sesuai dengan jalur yang dapat ditempuh. Dalam Pelaksanaan PPDB online, semua dapat melihat secara terbuka. Mohon maaf sekolah adalah dunia pendidikan (bukan ajang bisnis).</p>	19/06/2024	selesai	2 jam 14 menit

36	#i2400000951	Sekolah katanya gratis tapi masih banyak pungutan melalui komite, panitia, osis, pramuka dan lain-lain	26 Juni 2024	<p>Berdasarkan Surat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 420/4463 tanggal 17 Juli 2023 tentang Larangan Pungutan pada Satuan Pendidikan, disebutkan pada nomor 2 huruf b bahwa melarang satuan Pendidikan melakukan pemotongan dana bantuan siswa dengan alasan apapun dengan dalih sumbangan, infak, atau bentuk lainnya.</p> <p>Tentang iuran Pramuka, telah ada peraturan bersama 4 lembaga (Kwarcab, Dinas Pendidikan, Kantor kemenag dan Cabang Dinas Pendidikan wilayah X).</p> <p>Intinya, tidak ada kata gratis, tetapi sekolah dilarang melakukan pungutan dan boleh menerima sumbangan.</p>	27 Juni 2024	selesai	1 hari
----	--------------	--	--------------	--	--------------	---------	--------

37	#f2400002086	Tolong sekolah tidak usah meggunakan jalur zonasi apalagi jalur afirmasi, kasihan yg tidak punya PKH	28 Juni 2024	Adanya jalur zonasi bertujuan untuk pemeratakan jumlah siswa bagi sekolah negeri maupun swasta. Jalur afirmasi bertujuan untuk mengakomodir siswa dengan kebutuhan khusus/disabilitas dan penerima bantuan dr pemerintah. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki bantuan, dapat mendaftar melalui jalur prestasi maupun zonasi. Namun begitu, masukan Saudara akan menjadi bahan evaluasi bagi kami.	29 Juni 2024	selesai	1 hari
38	#w2400001837	Kenapa kuota tambahan tidak diberitahukan diawal di alur pendaftaran, jika diberitahukan diawal jadi tidak langsung cabut berkas	28 Juni 2024	Kuota yg Saudara maksud sudah ada di juknis PPDB tahun 2024/2025. Apabila kuota pada jalur afirmasi, prestasi maupun perpindahan org tua tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur zonasi.	29 Juni 2024	selesai	1 hari

39	#w2400001839	<p>Bagaimana nasib calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi dibanding calon peserta didik yg berdomisili disekitar sekolah terpaksa harus bersekolah di swasta? tolong di tindak lanjuti anak anak kami juga punya hak untuk mendapatkan hak bersekolah di sekolah negri seperti anak lainya. masalah nya bukan masalah pilih jalur,tapi anak tersebut masuk lwt zonasi dan sudah di tolak,masuk lagi lwt jalur pindah tugas orangtua</p>	29/06/2024	<p>Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah mengacu pada ketentuan Permendikbud RI Nomer 1 Tahu 2021, Perbup Nomoe 28 Tahun 2022 dan diperbaiki nomor 34 Tahun 2023, keputusan Bupati nomor 150 tahun 2024, serta juknis PPDB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Pada PPDB ada 4 jalur yang dapat dipilih sesuai kemampuannya. untuk aturan zonasi memang seperti itu, apabila ada siswa diluar zonasi tidak dapat diterima, sebenarnya dapat memilih jalur lain yaitu daftar melalui jalur prestasi apabila memang memiliki prestasi. Untuk perpindahan tsb bukan karena dilakukan oleh peserta PPDB, hal tsb terjadi memang karena sistem. Karena jalur perpindahan orang tua tidak ada pendaftaranya, maka secara sistem jalur tsb akan diisi oleh jalur zonasi yang peringkat nilainya ada dibawahnya. Semua sistem pemeringkatan sudah secara otomatis sesuai juknis yang berlaku.</p>	30/06/2024	selesai	1 hari
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	--------

40	#w2400001840	Lapor, di SMP N 2 Rawalo ada yang mendaftar jalur zonasi nilainya tergeser lalu pindah jalur pindah tugas, tapi yg pindah tugas bukan orang tuanya melainkan pegawai SMP disitu	29/06/2024	Setelah kami konfirmasi dengan KS, perpindahan tsb bukan karena dilakukan oleh peserta PPDB, hal tsb terjadi memang karena sistem. Karena jalur perpindahan orang tua tidak ada pendaftarannya, maka secara sistem jalur tsb akan diisi oleh jalur zonasi yang peringkat nilainya ada dibawahnya. Terima kasih	30/06/2024	selesai	1 hari
BULAN JULI							
41	#f2400002116	Ada infak sebesar 800 ribu di sekolah SMP Negeri dan wajib membayar untuk membangun masjid, apakah tidak ada bantuan dari pemerintah untuk membuat tempat ibadah di area sekolah	01/07/2024	Terimakasih sudah menyampaikan. Infak/sumbangan adalah bersifat sukarela dan tidak memaksa/memberatkan salah satu pihak. Untuk dana BOS dapat digunakan untuk operasional pemeliharaan bukan untuk pembangunan	01/07/2024	selesai	5 jam 30 menit
42	#f2400002119	Tolong sekolah untuk tidak mewajibkan murid membeli bahan seragam di sekolah, banyak yang ingin memakai seragam bekas karena ekonomi	01/07/2024	Terimakasih sudah menyampaikan. Tidak wajib untuk membeli seragam baru, dikembalikan lagi ke wali murid dan murid yang bersangkutan. Apabila sudah merasa nyaman dan masih layak dengan seragam yg sudah ada, maka tidak perlu membeli seragam yg baru. Maturnuwun 🙏	01/07/2024	selesai	7 jam 10 menit

43	#w2400001865	Apakah ketentuan Dinas Pendidikan atau dari sekolah yang mengharuskan daftar ulang siswa baru dibayarkan lunas tidak boleh dicicil	02/07/2024	Terimakasih sudah bertanya. Dinas Pendidikan tidak pernah mewajibkan/membuat aturan terkait hal tsb. Dikembalikan lagi ke kebijakan sekolah nggih	03/07/2024	selesai	1 hari
44	#f2400002133	di SMP 7 Purwokerto mewajibkan siswa baru membeli seragam di sekolah dan pembayarannya tidak boleh di angsur	03/07/2024	Terimakasih sudah menyampaikan. Tidak wajib untuk membeli seragam baru, dikembalikan lagi ke wali murid dan murid yang bersangkutan. Apabila sudah merasa nyaman dan masih layak dengan seragam yg sudah ada, maka tidak perlu membeli seragam yg baru. Maturnuwun 🙏	03/07/2024	selesai	2 jam 14 menit
45	#w2400001875	Tembok keliling SDN 1 Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng bagian samping terlihat hampir roboh dan dapat membahayakan siswa di SDN 1 Kutaliman	03/07/2024	Aduan akan segera di usulkan penanganannya dianggaran berikutnya	04/07/2024	selesai	1 hari
46	#w2400001918	di SMP 2 Kedungwuluh beli seragam dll sampai 2 juta lebih dan tidak boleh di angsur. Apakah itu ketentuan dari Dinas Pendidikan?	10/07/2024	Dinas Pendidikan tidak pernah mengatur ketentuan seperti itu. Kami juga berharap Saudara mau menanyakan langsung ke Sekolah agar diperoleh informasi yang lebih jelas. Kami meyakini tidak ada sekolah yang mewajibkan siswa membeli seragam.	11/07/2024	selesai	1 hari

47	#i2400001022	Tolong bikin aturan tentang perpisahan sekolah murid tidak perlu memberi sesuatu ke gurunya karena kasihan orang yang tidak mampu kasih nanti menjadi minder	12/07/2024	Terimakasih atas masukannya. Memberi barang atau sejenisnya mungkin sebagai bentuk tanda terima kasih/apresiasi kepada guru yg bersangkutan dan hal tersebut tidaklah wajib. Jika saudara merasa keberatan, maka tidak ada paksaan atau jika berkenan Saudara dapat memberi sesuai kemampuan. Tidak ada aturan khusus untuk hal tersebut, kembali lagi pada kebijaksanaan dan kesepakatan bersama. Maturnuwun	15/07/2024	selesai	3 hari
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	--------

48	#L2400000315	Lapor, adanya paguyuban wali murid yang seolah mewajibkan di SD Negeri Datar Kec.Sumbang yang isinya orang orang yg gubes iri dengki bukannya fokus ke pendidikan anak, masa klo ada urusan dengan guru/sekolah harus laporan dulu ke paguyuban dan adanya pungutan kas di paguyuban tsbt yg parahnya ditagihkan nya ke anak2 kelas satu yg masih kecil yg notabene bukan kewajiban anak dan juga bukan kewajiban anak sekolah. Sebenarnya dari dinas apakah diwajibkan adanya paguyuban wali murid?	13/07/2024	Terima kasih atas pertanyaannya. Paguyuban Wali Murid adalah perkumpulan orang tua siswa yang tergabung dalam sebuah sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu sekolah dalam sosialisasi program-programnya serta menyuarakan pendapat, ide, dan saran demi kemajuan sekolah. Fungsi paguyuban ini sebagai perpanjangan tangan guru kepada wali murid, memastikan program-program sekolah dipahami dengan baik oleh wali murid, dan meningkatkan kerjasama serta keikutsertaan orang tua. Dengan demikian, paguyuban wali murid berperan penting dalam memajukan pendidikan di sekolah.. Berkenaan dengan kasus yg Saudara sampaikan,	15/07/2024	selesai	2 hari
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	--------

				<p>ada baiknya antaranggota paguyuban menyelenggarakan musyawarah atas dasar musyawarah mufakat. Kesepakatan yang ada merupakan hasil dari kolektivitas paguyuban, bukan perorangan. Untuk itu, diperlukan ketua paguyuban yang arif dan bijaksana, dapat menampung aspirasi, menarik dan memberikan solusi atas permasalahan di paguyubannya. Adanya dugaan oleh seseorang di paguyuban yg melakukan pungutan, sebaiknya dikomunikasikan dg ybs dan paguyuban, apakah benar atau tidak, dan jika itu dilakukan, ini adalah sesuatu yang menciderai arti paguyuban. Kepada KS SDN Datar diminta untuk melakukan koordinasi dan pembinaan kepada para ketua paguyuban yg ada di masing2 kelas, agar ada kesamaan persepsi antarpayuban dan anggotanya. Semoga informasi ini membantu! 😊</p>			
49	#w2400001985	di SMPN 1 Kecamatan Gumelar Kab.Banyumas dari tahun ke tahun selalu ada tarikan sumbangan ke murid	17/07/2024	Aduan telah ditindaklanjuti yaitu dengan mengadakan pertemuan wali murid dan pemberian penjelasan serta pemahaman mengenai rencana anggaran yang sudah di sosialisasikan.	18/07/2024	selesai	1 hari

50	#f2400002294	Di Yogyakarta sudah diterapkan sekolah dilarang pungut uang seragam, kapan kiranya Banyumas seperti itu	17/07/2024	Kab Banyumas telah memberlakukan larangan pungutan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 420/4463 tanggal 17 Juli 2023 tentang Larangan Pungutan pada Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa melarang satuan Pendidikan melakukan pungutan, termasuk seragam, LKS, pemotongan dana bantuan siswa dengan alasan apapun dengan dalih sumbangan, infak, atau bentuk lainnya. Demikian terimakasih.	18/07/2024	selesai	1 hari
51	#w2400001997	KIP dari SD dapat terus tetapi di SMP tidak keluar	18/07/2024	KIP merupakan program dari pemerintah yang diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Mulai tahun 2022, kriteria penerima KIP/PIP: 1. Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 2. Diusulkan oleh Sekolah 3. Penentu penerima KIP/PIP adalah dari Puslapdik yang diberikan secara bertahap SK demi SK sampai terakhir pada bulan Desember	18/07/2024	selesai	2 jam 23 menit

52	#G2400000142	Guru di SD 1 Cihonje guru hanya memberi tugas lalu ditinggal kelasnya, tolong ditindaklanjuti	23/07/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan melibatkan korwilcam dan pengawas ke sekolah tersebut dengan hasil bahwa aduan yang disampaikan tidak benar. Bahwa pada saat itu di SDN 1 Cihonje sedang ada kegiatan MAPSI tingkat Kecamatan, dimana SDN 1 Cihonje sebagai SD inti Gugus Wiyata Utama yang sering sebagai tempat kegiatan gugus atau kecamatan. Di SDN 1 Cihonje apabila ada guru yang memiliki kepentingan mendesak maka meminta bantuan guru lain untuk menggantikan sementara.	24/07/2024	selesai	1 hari
53	#i2400000955	di SMPN 7 Purwokerto ada guru yang pensiun dan semua anak diminta untuk membawa uang sebagai tali asih untuk guru tersebut. Kenapa hal tersebut selalu bebaskan ke murid, dan murid baru yang belum pernah diajar oleh guru tersebut	24/07/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan hasil bahwa pihak sekolah memutuskan untuk dibatalkan.	24/07/2024	selesai	2 jam 24 menit

54	#w2400002081	di SMPN 7 Purwokerto semua siswa yang dipinjamkan buku paket oleh sekolah diwajibkan untuk membeli sampul plastik seharga 10k disekolah, jika tidak membeli sampul maka tidak dipinjamkan buku	27/07/2024	Mohon untuk dapat juga memaknai hal tersebut sebagai motivasi serta ajakn kepada seluruh siswa agar dapat bersama sama merawat buku pelajaran yang dipinjamkan. Setelah konfirmasi dengan sekolah ybs, hal tersebut sebagai antisipasi agar murid tidak lupa dan lebih mudah membeli sampul plastik yang sudah disediakan di sekolah.	29/07/2024	selesai	2 hari
<b>BULAN AGUSTUS</b>							
55	#w2400002159	Di SMP 7 dan 8 akan mengadakan study tour pada bulan september dan oktober. Kami merasa keberatan walau bunyinya tidak memaksa, bukankah ada larangan dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah dalam hal ini?	06/08/2204	Dinas Pendidikan Kab.Banyumas telah mengeluarkan surat keputusan berkenaan dengan kegiatan Outing Class, apabila memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan Outing Class dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka kegiatan tersebut diizinkan.	06/08/2024	selesai	11 jam
56	#f2400002571	SMP N 1 BATURRADEN SD N 2 KEMUTUG LOR BATURRADEN tiba-tiba mengadakan study tour, bukannya sudah dilarang?	06/08/2024	Dinas Pendidikan Kab.Banyumas telah mengeluarkan surat keputusan berkenaan dengan kegiatan Outing Class, apabila memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan Outing Class dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka kegiatan tersebut diizinkan.	07/08/2024	selesai	8 jam 30 menit

57	#f2400002591	SDN 1 KARANGKLESEM Purwokerto Selatan ada pungutan sebesar 210ribu setiap siswa dengan alasan perbaikan jendela, tembok dan wc sekolah, belum ada bukti fisik karena kemarin baru diadakan kumpulan wali murid dengan komite sekolah untuk membahas terkait perbaikan sekolah berupa jendela kelas, tembok, pengecatan ulang tembok dan perbaikan wc	08/08/2024	Aduan telah ditindaklanjuti berdasarkan konfirmasi dan kronologi yang diperoleh, terdapat unsur pungutan karena jumlah besaran dana dan waktu telah ditentukan. Menunjuk pada Permendikbud 75 tahun 2016 dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas Nomor 420/4463 tanggl 17 Juli 2023 tentang Larangan Pungutan pada satuan Pendidikan, maka kegiatan di SDN 1 Karangklesem diminta untuk dibatalkan.	13/08/2024	selesai	5 hari
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	--------

58	#w2400002220	Dengan adanya 5 hari sekolah, sebagai wali murid merasa kasihan dengan anak. Uang saku bertambah, aktivitas di rumah tidur dan belajar dan besoknya berangkat lagi. Hari Sabtu juga ada kegiatan ekstrakurikuler	12/08/2024	<p>Lima (5) hari sekolah di Kabupaten Banyumas diberlakukan sejak 1 November 2022, yang didasarkan pada Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Nota Dinas kepada Bupati Banyumas No. 421/8943 tanggal 19 September 2022 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/10805 tanggal 31 Okt 2022. Adapun maksud diselenggarakannya 5 HS adalah a) untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah; b) bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah.</p> <p>Pelaksanaan 5HS di Kabupaten Banyumas sampai hari ini secara umum tidak ada kendala dan banyak mendapat dukungan dari banyak pihak. Dinamika yang ada berkenaan dengan pelaksanaan 5 HS akan kami jadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi.</p>	13/08/2024	selesai	1 hari
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	--------

59	#f2400002666	KIP SMP kapan keluar, sekolah negeri/swasta selalu ada uang pengembangan gedung/bangunan	13/08/2024	<p>KIP merupakan program pemerintah yang ditangani langsung oleh Puslapdik kemendikburistek.</p> <p>KIP/PIP sudah mulai disalurkan mulai bulan April 2024 yg pencairannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan SK Pemberian, proses pentahapan SK pemberian terus berjalan sampai diakhir tahun.</p> <p>Silahkan kalau namanya sudah masuk pada SK pemberian dapat dicek dan segera dicairkan.</p> <p>Hanya perlu dipahami, bahwa syarat untuk mendapatkan KIP/PIP, per tahun 2022 syarat utama siswa dapat diusulkan KIP/PIP harus terdaftar dalam DTKS.</p> <p>Penentu menerima atau tidak, kapan waktunya adalah dari pusat</p> <p>Terima kasih</p>	13/08/2024	selesai	2 jam 34 menit
60	#w2400002235	Keluhan perihal pegawai SMPN 3 Banyumas yang bertugas menyeberangkan murid di depan sekolah mengatakan hal-hal kasar dan tidak sopan karena saya agak terburu-buru karena akan mengantar suami menjalani hemodialisis/cuci darah tapi saya sudah berhati-hati. Pegawai tsb mengatakan hal yg sangat tidak sopan kepada kami	15/08/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan pemberian pembinaan terhadap petugas tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang bersangkutan	15/08/2024	selesai	2 jam 55 menit

61	#w2400002248	di SMP 2 Cilongok ada iuran untuk kegiatan persami. Iuran makan sebesar 15ribu tetapi ke penjual nasi hanya 10ribu, sisa 5ribu tidak dikembalikan.	16/08/2024	Telah ditindaklanjuti berupa konfirmasi dari pihak sekolah, bahwa sisa anggaran 5ribu digunakan untuk keperluan membeli galon air minum selama kegiatan serta membeli snack.	19/08/2024	selesai	3 hari
62	#i2400001174	Sudah hampir 1 tahun 2 ruang kelas tidak bisa digunakan untuk kegiatan KBM karena rusak berat. Lokasi SDN 2 Tanggeran Korwilcam Somagede	23/08/2024	<p>Kami sampaikan bahwa upaya Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mengusulkan penanganan SDN 2 Tanggeran melalui Anggaran DAK, sejak usulan 2024 dan 2025 sudah kami lakukan, dengan harapan dapat menuntaskan Sarpras yang dibutuhkan, namun belum juga masuk,</p> <p>Sehingga akan kami masukkan dalam prioritas Penanganan menggunakan Anggaran DAU Earmark tahun 2025.</p>	23/08/2024	selesai	9 jam 46 menit

63	#L2400000321	Terjadi pungutan/iuran dan sumbangan pembangunan di SMPN 5 Purwokerto dan pemaksaan beli buku/lks di SDN 1 Karangklesem Purwokerto	23/08/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dan konfirmasi dengan pihak sekolah ybs bahwa tidak ada sumbangan pembangunan di SMPN 5 Purwokerto dan tidak ada paksaan dalam membeli buku/LKS (tidak mewajibkan, tapi sekolah memfasilitasi jika ada yang akan membeli) di SDN 1 Karangklesem	23/08/2024	selesai	5 jam 18 menit
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	----------------

64	w2400002337	<p>Kami mengikuti program gratis dari SKB Purwokerto tentang tata rias, tetapi kenyataannya harus meminta dana ke kelurahan sebagai tanda dukungan. Kami diberikan make up sebagai penunjang namun paket make up tersebut wajib dikembalikan di SKB. Diakhir masa pelatihan ada evaluasi dimana kami harus mengeluarkan dana untuk menyewa perhiasan, membayar laundry, membeli melati, membayar model, memesan makan siang snack dll .</p>	23/08/2024	<p>Aduan telah ditindaklanjuti berupa klarifikasi dari SKB Purwokerto antara lain : bahwa mitra kerja dihimbau kesediaan daya dukung yang dapat diberikan dalam bentuk penyiapan sarpras, bantuan transport warga masyarakat sebagai peserta apabila proposal yang diajukan disetujui oleh Pemerintah Pusat. Alat make up dapat dimanfaatkan oleh peserta pada saat ada kegiatan terkait hal tersebut maka hal tersebut adalah milik penyelenggara untuk pelaksanaan program. Tidak ada tekanan kepada peserta, semua sudah disampaikan sesuai dengan juknis dari Kemendikbud Ristek. Evaluasi akhir bermaksud untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan telah dikoordinasikan bersama.</p>	24/08/2024	selesai	1 hari
----	-------------	---	------------	--	------------	---------	--------

65	#w2400002387	Pemaksaan di SDN 5 Teluk Purwokerto Selatan yang sedang melaksanakan akreditasi bahwa paguyuban agar terlibat lebih banyak dalam pengadaan sarpras dan hias kelas dan ketika kegiatan lomba sekolah seolah lepas tangan menyerahkan semua ke wali murid, tidak ada kerjasama.	29/08/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dan klarifikasi dari pihak sekolah ybs dengan hasil antara lain bahwa benar sekolah sedang menghadapi akreditasi, maka dibutuhkan kerjasama yang baik. Telah diselenggarakan rapat yg dihadiri oleh dewan guru, ketua komite sekolah, dan korwilcam dindik purwokerto selatan untuk bersama-sama berkolaborasi antara orang tua murid dan pihak sekolah dalam melaksanakan akreditasi dan menjadi poin penting dalam penilaian. Berkenaan dengan lomba, sekolah selalu berupaya memaksimalkan potensi siswa dengan mengundang pelatih yg kompeten dengan honor berasal dari dana BOSP tanpa meminta kepada orang tua siswa, namun ada orang tua siswa yang dengan ikhlas turut membantu finansial untuk menyediakan transportasi siswa.	30/08/2024	selesai	1 hari
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	--------

66	#w2400002397	Di SDN 2 Banteran Wangon selalu ada pembangunan yang dibebankan ke siswa, sebesar 300ribu untuk pembangunan gudang dan wc	30/08/2024	Aduan telah ditindaklanjuti berupa surat pernyataan dari pihak sekolah bahwa sumbangan sebesar 300ribu sudah berdasarkan kesepakatan wali murid dalam rapat dengan Komite Sekolah. Komite Sekolah membuat solusi untuk pembangunan gudang menunggu bantuan Pemerintah dan/atau mencari donatur dengan menerima sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.	10/09/2024	selesai	11 hari
<b>BULAN SEPTEMBER</b>							
67	#w2400002487	Di SMP Negeri 1 Baturraden terjadi penahanan ijazah kepada siswa yang lulus tahun ajaran 2023/2024 dengan alasan belum menyelesaikan administrasi pembayaran iuran sekolah, belum membayar sisa ujian	05/09/2024	Aduan telah ditindaklanjuti bahwa ijazah sudah diserahkan kepada siswa yang bersangkutan	11/09/2024	selesai	6 hari
68	#f2400003023	Di SDN 3 Tanjung Purwokerto jendela sekolah sudah keropos membahayakan siswa	05/09/2024	Untuk SDN 3 Tanjung sudah kami usahakan diusulkan Prioritas pada DAK Tahun 2025, namun belum masuk juga, karena keputusan dari Kementrian Pendidikan. Namun akan kami Usulkan kembali dari Anggaran lain untuk Penanganan tahun 2025.	09/09/2024	selesai	4 hari

69	#w2400002584	Apakah dibolehkan SMP Negeri melakukan iuran hanya untuk membeli TV, bukankah sudah disubsidi negara	11/09/2024	Perlu diketahui, TV digunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Pengadaan/pembelian sepenuhnya dilakukan oleh Paguyuban Orang Tua/Wali (Komite). Karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka komite.sekolah perlu memberi kesempatan dan peran serta masyarakat guna mendukung program pendidikan di sekolah tentunya yang bersifat tidak mengikat.	12/09/2024	selesai	1 hari
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	--------

70	#w2400002730	<p>1. Apa benar kegiatan tersebut wajib diikuti oleh siswa?</p> <p>2. Apa benar jika tidak bisa mengikuti outing class tetap membayar sebesar biaya outing class full?</p> <p>3. Kemudian untuk kebijakan lokasi dan biaya apakah ada peraturan tertentu dari dindik banyumas?</p> <p>4. Berapa standar atau rentang biaya umumnya kegiatan outing class dengan lokasi misalnya JOGJA untuk siswa tingkat dasar negri di wilayah banyumas?</p>	20/09/2024	<p>1. Tidak. Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas nomor 400.3.1/5205/2024 pada:</p> <p>a. Bab V angka 1 bahwa adanya larangan memaksakan/mewajibkan peserta didik mengikuti pembelajaran di luar kelas, terutama kegiatan yg dilaksanakan secar amassal dan memerlukan biaya khusus,</p> <p>b. Bab VI angka 3, bahwa pembelajaran di luar kelas bersifat tentative/pilihan dan tidak mengikat.</p> <p>2. Tidak. Sesuai Keputusan Kadindik tadi Bab VI angka 4 bahwa peserta didik kurng mampu difasilitasi melalui subsidi silang, keringanan biaya, donasi, dan fasilitas lain sesuai kemampuan anggaran,</p>	23/09/2024	selesai	3 hari
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	--------

				<p>angka 5: peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena alasan tertentu difasilitasi dalam bentuk kegiatan lain yang sesuai. 3. Lokasi penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan program sekolah (Bab VII). Untuk Pembiayaan, bersumber dari orang tua/walimurid dan atau sumber lain. Pembiayaan yang bersumber dari orangtua/wali murid diputuskan melalui rapat antara Komite sekolah, kepala sekolah, dewan guru dan orang tua/wali murid yg dituangkan dalam RAB dan dilengkapi Berita Acara(Bab IV). 4. Pembiayaan disesuaikan dengan hasil Keputusan rapat antara Komite Sekolah/orang tua/wali, pihak sekolah, dan pihak ketiga. Pembiayaan digunakan untuk belanja kegiatan berupa belanja jasa dan belanja barang. Dinas Pendidikan tidak menentukan standar biaya penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas.</p> <p>Demikian, untuk selengkapnya dapat dibaca Keputusan Kadindik dimaksud.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

71	#w2400002731	Anak sekolah seharusnya tidak boleh membawa motor, sudah pernah ada kecelakaan dari siswa SMPN 2 Somagede. Selain itu ada siswa yg masih menggunakan seragam sekolah lalu mampir di warung merokok	20/09/2024	Dinas Pendidikan telah menerbitkan surat larangan siswa SMP mengendarai sepeda motor. Bukan hanya itu, dinas pendidikan juga telah secara langsung dan terus menerus menghimbau serta memberi solusi melalui sekolah berkenaan dengan peserta didik yang mengendarai motor. Hal ini juga oleh sekolah telah dikomunikasikan dengan orang tua/wali. Namun tanggapan orang tua/wali bermacam macam alasan. Ada yang melaksanakan aturan dengan tidak mengizinkan anaknya ke sekolah membawa sepeda motor dan memilih mengantarkan anaknya ke sekolah. Ada yang mengizinkan anaknya membawa sepeda motor ke sekolah dengan alasan tidak ada yang mengantar.	23/09/2024	selesai	4 hari
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	--------

72	#f2400003416	Katanya study tour sudah tidak diijinkan, tapi masih ada sekolah yang mengadakan study tour dengan dalih ganti nama PLK pembelajaran luar kelas	26/09/2024	<p>Izin kami sampaikan kegiatan outing class merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas, peserta didik diajak untuk belajar dengan melihat secara langsung obyek-obyek/sumber belajar, sifatnya sukarela, tidak wajib, tidak memberatkan orang tua/wali.</p> <p>Dinas Pendidikan telah mengeluarkan panduan berkenaan dengan pembelajaran di luar kelas SD dan SMP di Kabupaten Banyumas Nomor 420/10757/2023 tanggal 15 November 2023 yang berisi rambu-rambu serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan outing class.</p>	26/09/2024	selesai	12 menit
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	----------

73	#w2400002794	Tunjangan gaji ke-13 untuk guru 50% belum cair	26/09/2024	Kami sampaikan bahwa kami Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas Pendidikan telah menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHP) ke DJPK Kemenkeu sebagai dasar usulan pemberian Gaji Ke 13 dan Gaji 14 bagi ASN Guru yang tidak mendapatkan TPP, berdasrkan penjelasan DJPK bahwa saat ini masih berproses untuk dapat diterbitkannya PMK.dan proses ini juga berlaku di semua kabupaten lain.Demikian kami sampaikan untuk diketahui bersama perhatiannya disampaikan terima kasih.	26/09/2024	selesai	1 jam
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	-------

				<p>Atas pertanyaan Bapak/Ibu, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB secara daring melalui tautan <a href="https://bit.ly/ViconDinas PendidikanKab Banyumas07-03-2024">https://bit.ly/ViconDinas PendidikanKab Banyumas07-03-2024</a> yang diikuti oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas, disampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan mentransfer Dana TPG ke 13 tahun 2023 tersebut pada tahun 2024 ini. Sampai dengan saat ini dana tersebut belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas karena penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pembayaran TPG ke-13 tersebut masih berproses di Kementerian Keuangan.</p>			
74	#w2400002803	Tembok SDN 3 Karanglesem miring, tolong pemda barangkali jadi prioritas unutk keselamatan anak-anak	27/09/2024	Untuk pagar keliling depan SDN 3 Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan sudah masuk dalam usulan Prioritas Penanganan tahun 2025, terima kasih.	27/09/2024	selesai	53 menit

75	#w2400002826	Anak sekolah jangan terlalu sore pulang, kebijakan 5 hari sekolah tidak efektif	29/09/2024	<p>1. Perlu diketahui bahwa kebijakan Lima (5) hari sekolah di Kabupaten Banyumas sudah melalui kajian yang mendalam. Jenjang SMP mulai berlaku tahun 2017 dan SD sejak 1 November 2022, yang didasarkan pada Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Nota Dinas kepada Bupati Banyumas No. 421/8943 tanggal 19 September 2022 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/10805 tanggal 31 Okt 2022.</p> <p>2. Adapun maksud diselenggarakannya 5 HS adalah a) untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah; b) bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah.</p>	29/09/2024	selesai	9 jam
----	--------------	---	------------	--	------------	---------	-------

				<p>3. Kurang tepat jika dikatakan “kesoren baline”, sebab di SD pembelajaran sesuai jadwal: Kelas I mulai pukul 07.00 s.d. maks 11.30; kelas II s.d. 11.35; kelas III s.d. pk 12.10; dan kelas IV-VI pk 07.00 s.d. maks 12.45. Beberapa sekolah menerapkan jamaah duhur sampai pk 13an. Sekolah yg menyelenggarakan kegiatan estrakurikuler (pilihan/tidak wajib) pada hari tertentu mulai pk 13.00 s.d. pk 15.00.</p> <p>4. Siswa berada di sekolah sekitar 6 jam, selebihnya ada di keluarga dan masyarakat, maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama orang tua dalam membentuk karakter anak.</p> <p>Terima kasih.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

76	#w2400002843	Mohon bantuan ijazah asli hilang, SDN 2 Kebumen Kecamatan Baturraden. Mohon dibantu prosedurnya bagaimana	30/09/2024	<p>Untuk ijazah yg hilang, ybs agar menghubungi sekolah untuk dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dengan memenuhi persyaratan sbb.</p> <p>SYARAT PENGAJUAN</p> <p>SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH SEKOLAH DASAR</p> <p>1. Surat Keterangan dibuat oleh pihak Sekolah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bermaterai Rp 10000</p> <p>2. Pengajuan dilampiri dengan:</p> <p>a. Fotocopi ijazah</p> <p>b. Surat Keterangan Laporan kehilangan dari Kepolisian</p> <p>c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pemohon bermaterai 10000.</p> <p>d. Surat Pernyataan saksi satu angkatan (sebanyak 2 orang) di lampiri fotokopi KTP dan Fotokopi IJAZAH.</p> <p>(Jika sekolah sudah tutup tidak ada data diri di sekolah)</p>	30/09/2024	selesai	2 jam
----	--------------	--	------------	--	------------	---------	-------

			<p>d. Surat Pernyataan saksi satu angkatan (sebanyak 2 orang) di lampiri fotokopi KTP dan Fotokopi IJAZAH. (Jika sekolah sudah tutup tidak ada data diri di sekolah)</p> <p>Jika fotokopi IJAZAH pemohon tidak ada, ditambah lampiran</p> <p>a. Surat keterangan dari Sekolah bahwa yang bersangkutan benar-benar menjadi siswa pada sekolah tersebut.</p> <p>b. Fotokopi buku induk siswa dari sekolah.</p> <p>Jika ingin keterangan lebih lanjut, silakan datang ke kantor Dindik.</p>			
BULAN OKTOBER						

77	#w2400002859	Di SDN 1 Wangon banyak iuran yang berkedok infak dan biaya ekstra. Penyambutan murid baru terlalu berlebihan dan anggaran dibebankan ke wali murid. Kelas 6 diwajibkan outing class ke Jogja dengan membayar 450rb , wali murid tidak diajak berunding	01/10/2024	Aduan telah ditindaklanjuti berupa konfirmasi oleh pihak sekolah bahwa program dan kegiatan yang terlaksana sudah berdasarkan diksusi dan kesepakatan dengan wali murid seperti adanya tenaga pelatih ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi non akademik siswa, dana yg sudah dibayarkan tentu dikembalikan lagi ke siswa, karena keseluruhan biaya tidak dapat dianggarkan dengan dana BOS saja, maka perlu partisipasi wali murid dalam mendukung kegiatan siswa. Untuk kegiatan MPLS pihak sekolah tidak memungut biaya sedikitpun, seluruh kegiatan dianggarkan melalui dana BOS. Berkaitan dengan outing class, sekolah tidak pernah mewajibkan siswa untuk ikut, dan sekolah menindaklanjuti arahan dari dinas agar melibatkan biro yang legal dan tergabung dalam PBMAS.	04/10/2024	selesai	3 hari
78	#f2400003734	Hilangkan pungli di sekolah enegri dalam bentuk dan nama apapun. Diskusi dengan murid dan ornag tua murid, jangan hanya dengan pihak sekolah saja	11/10/2024	Dinas Pendidikan senantiasa melakukan monitoring ke sekolah dan pada tanggal 9 Oktober 2024 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan paguyuban komite sekolah	11/10/2024	selesai	1 jam 20 menit

79	#w2400003019	Mohon penjelasan kenapa sekolah negeri banyak tarikan uang gedung dll, padahal sekolah negeri itu kan dibiayai pemerintah. Kalau begitu hapus saja embel-embel sekolah negeri.	15/10/2024	<p>Pembiayaan sekolah negeri memang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun tidak semua pembiayaan ditanggung Pemerintah, walaupun ditanggung pemerintah tidak dapat setiap tahun memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah karena pemerataan bantuan.</p> <p>Melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sekolah diberi kesempatan menerima sumbangan secara sukarela dari masyarakat berupa uang maupun barang.</p> <p>Berkenaan dengan yang Saudara sampaikan, mohon dipastikan terlebih dahulu, itu sumbangan atau bagaimana. Dan jika karena satu dan lain hal Saudara keberatan, dapat disampaikan atau dikomunikasikan dengan Komite/Sekolah. Terimakasih.</p>	15/10/2024	selesai	3 jam 26 menit
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	----------------

80	#f2400004048	Purwokerto Darurat Intoleran, paksaan penggunaan jilbab bagi siswi di sekolah-sekolah negeri sudah sangat masif	29/10/2024	<p>Permasalahan tersebut kiranya perlu dilihat secara lengkap dan menyeluruh. Perlu juga diperhatikan sebab musabab nya.</p> <p>Tugas guru meliputi mendidik, mengajar, melatih, dan melaksanakan tugas tambahan lain.</p> <p>Mendidik, berkenaan dengan sikap perilaku budi pekerti dan akhlak.</p> <p>Termasuk menjalankan ajaran2 agama dan kepercayaan yang dianut nya.</p> <p>Mohon maaf, kemungkinan guru tersebut tidak mengetahui kalau anak tersebut penghayat.</p> <p>Karena kemungkinan pada biodata peserta didik tercatat memeluk agama tertentu, mengikuti pembelajaran pendidikan agama tertentu. Sehingga, manakala itu terjadi maka guru tentunya mengajak peserta didik menjalankan secara penuh ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan.</p>	29/10/2024	selesai	1 hari
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	--------

81	#w2400003151	Mohon bantuan pemerintahan banyumas untuk pagar keliling dan ruang kelas SDN 1 Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungnateng sudah tidak memadai karena sudah hampir roboh	30/10/2024	<p>Betul bahwa kondisi kerusakan SDN 1 Dawuhan Kulon sudah kami inventarisir melalui Survei yang dilakukan oleh Konsultan pada tahun 2023. Hasilnya sebagai dasar untuk Mengusulkan Penanganan melalui DAK tahun 2025, namun berdasarkan penilaian dari Pusat belum masuk yang disetujui,</p> <p>Sehingga SDN 1 Dawuhan Kulon kami masukkan dalam Usulan Prioritas Penanganan oleh Dinas Pendidikan Kab. Banyumas dengan Anggaran DAU Earmark tahun 2025.</p> <p>Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terimakasih.</p>	30/10/2024	selesai	1 jam
82	#w2400003153	Lapor terkait tunjangan sertifikasi guru SD triwulan 3 bulan sampai saat ini belum turun sangat telat dan tunjangan sertifikasi 13 14 (thr dan gaji 13)	30/10/2024	<p>Untuk bulan Juli, Agustus dan September sedang proses dan minggu depan clear. Untuk Tp 13 dan 14 masih menunggu transfer anggaran dari pusat dan SK Kemenkeu. Demikian, terima kasih.</p>	30/10/2024	selesai	31 Menit

83	#w2400003166	Guru di SD 1 Samkul telah bekerja sama dengan kepala sekolah SMP Diponegoro Gumelar dan mendapat komisi 100ribu per individu, berkas pendaftaran dipegang oleh guru tersebut dan tidak didaftarkan di SMPN 1 Gumelar, sehingga siswa tidak ada yang diterima di sekolah tersebut.	31/10/2024	Telah ditindaklanjuti berupa surat pernyataan dari yang bersangkutan yang berisi bahwa aduan yg disampaikan tidak benar, guru sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan dan juknis PPDB. Untuk proses pendaftaran setelah tidak diterima di SMPN 1 Gumelar diserahkan ke wali murid tidak dikondisikan oleh guru kelas VI. Peserta didik banyak yang diterima di SMPN 1 Gumelar, SMPN 3 Gumelar, SMPN 1 Ajibarang dan lainnya (terlampir)	01/11/2024	selesai	1 hari
84	#w2400003172	Di SMP 1 Somagede setiap ajaran baru meminta dana untuk membangun sekolah bahkan yg tahun lalu belum lunas sudah diminta lagi, apa memang sekarang sudah ada uang gedung lg kaya dulu	31/10/2024	Melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sekolah diberi kesempatan menerima sumbangan secara sukarela dari masyarakat berupa uang maupun barang. Berkenaan dengan yang Saudara sampaikan, mohon dipastikan terlebih dahulu, itu sumbangan atau bagaimana. Dan jika karena satu dan lain hal Saudara keberatan, dapat disampaikan atau dikomunikasikan dengan Komite/Sekolah. Terimakasih.	01/11/2024	selesai	1 hari

BULAN NOVEMBER							
85	#w2400003212	Sertifikasi guru triwulan ke-3 kapan cair, sudah bulan November	04/11/2024	Dapat kami sampaikan bahwa kami Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas Pendidikan telah menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHP) ke DJPK Kemenkeu sebagai dasar usulan pemberian Gaji Ke 13 dan Gaji 14 bagi ASN Guru yang tidak mendapatkan TPP, berdasrkan penjelasan DJPK Kemenkeu bahwa saat ini masih berproses demikian halnya dengan Tunjangan Profesi Guru triwulan 3 tahun 2024 yang saat ini masih berproses dan kami sedang berupaya keras untuk dapat segera disalurkan. Demikian kami sampaikan untuk diketahui bersama dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Minggu ini Insyaallah clear ke rekening	04/11/2024	selesai	2 jam 25 menit
86	#f2400004245	Dalam sektor Pendidikan berikan kesempatan para calon siswa yang ber prestasi ataupun tidak, dengan tidak adanya zonasi.	06/11/2024	Terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk pelaksanaan PPDB kita mengacu pada Permendikbud no 1 tahun 2021 yang mengatur ttg sistem PPDB ( ada 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi).	06/11/2024	selesai	1 jam 55 menit

87	#G2400000196	SMP N 3 Kedungbanteng memungut biaya uang gedung sebesar Rp.400.000 untuk pembangunan UKS. Mohon ditindaklanjuti, apakah ini diperbolehkan?	06/11/2024	<p>Melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sekolah diberi kesempatan menerima sumbangan secara sukarela dari masyarakat berupa uang maupun barang.</p> <p>Berkenaan dengan yang Saudara sampaikan, mohon dipastikan terlebih dahulu, itu sumbangan atau bagaimana. Dan jika karena satu dan lain hal Saudara keberatan, dapat disampaikan atau dikomunikasikan dengan Komite/Sekolah. Terimakasih.</p>	06/11/2024	selesai	4 jam 4 menit
----	--------------	---	------------	--	------------	---------	---------------

88	#f2400004256	Sekolah negeri untuk sumbangan dan study tour setahu saya sudah dihilangkan, tapi hanya teori saja karena faktanya masih banyak yang berjalan dengan nominal yang fantastis	07/11/2024	<p>Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan kurang sesuai dengan apa yang Saudara sampaikan.</p> <p>Sumbangan dan studi tour tidak dilarang/dihilangkan sama sekali.</p> <p>Masih boleh dilaksanakan asal memenuhi aturan-aturan yang berlaku.</p> <p>Berkenaan dengan sumbangan, Pemerintah telah mengatur melalui Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.</p> <p>Penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas juga ada regulasinya yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3.1/5205/2024.</p> <p>Jadi, sepanjang terpenuhi nya ketentuan-ketentuan, maka dua kegiatan yang Saudara maksud itu tidak dilarang.</p> <p>Adapun, kami menyarankan komunikasi dengan komite/sekolah mempunyai maksud yang sangat baik, agar terjalin komunikasi para pihak yang terlibat dalam pendidikan yaitu sekolah, orang tua dan masyarakat serta pemerintah.</p> <p>Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.</p>	08/11/2024	selesai	15 jam 24 menit
----	--------------	---	------------	--	------------	---------	-----------------

89	#G2400000202	Guru Agama SMPN 8 Purwokerto mewajibkan siswa kelas IX membawa Ayam hidup ke sekolah untuk Praktek Cara Menyembelih Hewan, ini memberatkan orang tua dan siswanya, selanjutnya untuk Apa Ayam yang telah di sembelih,.... Di ingatkan Kepsek SMPN 8 Purwokerto Pak Zuhri dan Guru Agama nya pak Rano.... Praktek tidak harus yang berbiaya/bisa menggunakan media lainnya yang tidak berbiaya	12/11/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut : 1. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memberi pengalam riil tentang halalnya hewan yang disembelih, 2. Seekor ayam ditanggung oleh kelompok, yang beranggotakan 3,4 bahkan 5 orang, 3. Ayam sembelihan dikembalikan ke siswa untuk praktik penyembelihannya saja	12/11/2024	selesai	40 menit
90	#w2400003487	Di SDN 1 Banjarsari Wetan 1 tidak ada guru olahraga, setiap bertanya ke anak siapa guru olahraganya, ternyata wali kelasnya	20/11/2024	Aduan telah ditindaklanjuti bahwa Kabupaten Banyumas kekurangan guru penjasorkes, sehingga untuk sekolah yang belum terpenuhi guru olahraganya akan di ampu Guru Penjaskes dari Sekolah lain.	20/11/2024	selesai	6 jam 36 menit
91	#w2400003503	Apa fungsi dari komite sekolah? Kenapa di SMP Negeri tidak ada pungutan SPP tapi muncul istilah infak yang besarannya bisa mencapai satu juta rupiah per siswa	20/11/2024	Seperti tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 2 ayat (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut komite bertugas salah satunya adalah menggalang dana dan sumber daya lainnya. Istilah infaq dapat diartikan sumbangan dalam upaya komite melaksanakan fungsinya.	23/11/2024	selesai	3 hari

92	#w2400003630	harga cetak foto per anak seharga 55 ribu rupiah. apakah itu harga wajar yg d bebaskan kepada para siswa.terimakasih. smp negeri 1 karanglewas, estimasi biaya seluruh siswa contoh sekelas 30siswa x 55rb = 1.650.000 8kelas x 1.650.000 = 13.200.000 biaya cetak foto saja segitu	28/11/2024	Aduan telah ditindaklanjuti bahwa Besaran 55 ribu rupiah adalah harga untuk biaya foto dan biaya cetak sebanyak 20 lembar dengan kualitas bagus karena foto tsb juga untuk ditempel pada ijazah. 20 lembar itu digunakan antara lain sebanyak 10 lembar; (2 lembar ukuran 2 x 3, 8 lembar ukuran 3 x 4), untuk keperluan kartu ujian sekolah (baik ujian praktik maupun tulis), denah tempat duduk ujian sekolah, denah ujian yang dipasang di pintu/jendela/dinding saat ujian berlangsung, untuk dipasang di ijazah, di administrasi sekolah lain, serta persiapan untuk mendaftar sekolah (SMA/SMK) dll yaitu 6 lembar ukuran 3 x 4 dan 4 lembar ukuran 4 x 6 (10 lembar ini diberikan ke siswa nya). Bukan hanya foto, tapi siswa juga akan diberi file foto tersebut.	28/11/2024	selesai	5 jam 14 menit
BULAN DESEMBER							

93	#w2400003684	Menjelang akhir tahun SD SMP mengadakan piknik, tolong dihapus karena seringkali bisnis terselubung dan keadaan ekonomi tidak sama	02/12/2024	<p>Mengenai kegiatan plesiran atau piknik yang biasanya diadakan menjelang akhir tahun ajaran, izinkan kami memberikan beberapa penjelasan dan pertimbangan:</p> <p>A. Tujuan Kegiatan</p> <p>Plesiran atau piknik sekolah sebenarnya bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan bagian dari pembelajaran yang bersifat non-formal. Kegiatan ini sering dirancang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengalaman belajar di luar kelas.</li> <li>2. Mengembangkan kemampuan sosial siswa melalui interaksi dan kebersamaan.</li> <li>3. Memberikan apresiasi terhadap capaian siswa selama satu tahun ajaran.</li> </ol> <p>B. Kesetaraan Ekonomi</p> <p>Kami memahami bahwa tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sama. Untuk itu, kami memastikan bahwa kegiatan seperti ini bersifat opsional dan tidak membebani peserta didik atau orang tua yang kurang mampu. Beberapa solusi yang bisa diterapkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memilih lokasi kegiatan yang terjangkau.</li> <li>2. Menggalang dana secara kolektif</li> </ol>	03/12/2024	selesai	1 hari
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	--------

				<p>atau orang tua yang kurang mampu. Beberapa solusi yang bisa diterapkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memilih lokasi kegiatan yang terjangkau.</li><li>2. Menggalang dana secara kolektif untuk membantu siswa yang membutuhkan.</li><li>3. Memberikan alternatif kegiatan di sekolah bagi siswa yang tidak dapat ikut.</li></ol> <p>C Pengelolaan Transparan</p> <p>Kami sangat mendukung transparansi dalam pengelolaan dana kegiatan. Jika ada kekhawatiran mengenai "bisnis terselubung," kami berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melibatkan komite sekolah dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana.</li><li>2. Memberikan laporan terbuka mengenai anggaran kegiatan kepada orang tua siswa.</li></ol> <p>D. Rekomendasi</p> <p>Jika kegiatan plesiran dianggap kurang relevan atau memberatkan, kami terbuka untuk mendiskusikan opsi lain, seperti kegiatan berbasis budaya atau edukasi di lingkungan sekolah yang tidak memerlukan biaya besar namun tetap</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

94	#f2400004761	Musim perpisahan anak sekolah, apakah masih ramai tarikan iuran untuk perpisahan yang nominalnya memberatkan	06/12/2024	<p>Acara perpisahan sekolah di sekolah bukanlah keharusan namun bagi siswa merupakan acara yang monumental, penuh kenangan. Sehingga di beberapa sekolah siswa menghendaki diadakan dengan meriah, bagi kita orang tua merasa diadakan secara sederhana saja bisa.</p> <p>acara perpisahan baik yang meriah maupun sederhana memerlukan biaya. Darimana semua pembiayaan acara perpisahan?</p> <p>Tentunya dari siswa.</p> <p>Penentuan acara perpisahan biasanya dilakukan melalui musyawarah.</p>	07/12/2024	selesai	8 jam
----	--------------	--	------------	---	------------	---------	-------

95	#w2400003820	Dana PIP atau bantuan pendidikan kenapa yang dapat hanya anak itu-itulah saja, tolong diaudit. Bagaimana sekolah menyeleksi siswa penerima, asal main data lama saja	10/12/2024	<p>Siswa penerima PIP adalah dari keluarga yang sudah masuk pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Dinsos kalau ada siswa menerima PIP secara terus menerus berarti siswa tersebut data keluarganya masuk pada DTKS yang masih aktif, jika ada siswa belum menerima PIP monggo untuk bisa konsultasi ke Desa/Kelurahan setempat untuk bisa di data dan di masukan ke DTKS.</p> <p>Untuk proses pengusulan PIP adalah data berdasarkan Dapodik dari usulan setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan hanya memverifikasi berdasarkan data yang masuk dari setiap Satuan pendidikan. Penentu penerima PIP langsung dari Puslapdik Kemendikbudristek sesuai dengan SK Pemberian yang dikeluarkan.</p> <p>Terimakasih</p>	10/12/2024	selesai	2 jam 54 menit
96	#w2400003977	Bukankah sekolah sampai dengan jenjang SMA itu gratis? Pungli berkedok infak tidak dibenarkan, ditambah ancaman berupa rapot tidak dibagikan oleh oknum guru. Di SMP N 2 Wangon	20/12/2024	Aduan telah ditindaklanjuti dengan sekolah yang bersangkutan bahwa aduan tersebut tidak benar. Tidak ada ancaman mengenai sumbangan dengan penyerahan rapor siswa.	20/12/2024	selesai	3 jam 6 menit

97	#f2400005091	Apakah dibenarkan adanya sekolah dasar negeri ada iuran pembangunan dll	21/12/2024	<p>Perlu diketahui bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab Banyumas no. 420/4463 th 2023, disebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melarang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pungutan dalam bentuk apapun, termasuk yang dikaitkan dengan penerimaan peserta Didik, penerimaan rapor, kenaikan, atau kelulusan.</li> <li>2. Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>Untuk lebih jelasnya sebaiknya Saudara berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah/komite tentang iuran yg saudara maksud.</p>	21/12/2024	selesai	4 jam 11 menit
----	--------------	---	------------	---	------------	---------	----------------

98	#w2400004026,	Untuk TPG guru TW 4 Kab.banyumas sampai hari ini belum juga disalurkan ke rek.guru, mohon konfirmasi dan kepastiannya	23/12/2024	Tanggal 30 Desember akan disalurkan ke rekening masing-masing, tidak hanya triwulan 4 tetapi semua. TPG guru saat ini dalam tahapan proses nadministrasi usulan yang dilaksanakan melalui ketentuan keuangan daerah.	23/12/2024	selesai	10 jam 3 menit
99	#w2400004037	<p>di SDN 1 Sanggreman ada pungutan/iuran yang besarnya terlalu tinggi dengan rincian sebagai berikut : Infak Rp150.000 pertahun untuk bayar Pesuruh, Perbaikan ruang KepSek, dan Dapur Sekolah</p> <p>* Iuran Ngaji Rp 15.000/bulan x 1tahun = Rp 180.000</p> <p>* Iuran Pramuka Rp 60.000</p> <p>Jadi Anggaran yang dibebankan ke seluruh Wali Murid dalam kurun waktu 1 (satu tahun) Total Rp 390.000</p> <p>Belum termasuk Seragam Sekolah ( Baju Seragam Baju Batik)</p> <p>Keterangan : Rp 150.000 Laki-laki. Rp 180.000 Perempuan.</p> <p>Jadi Total Iuran yang dibeban kepada Wali Murid disekolah anak kami SDN 01 Sanggreman Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Rp 570.000 dalam kurun waktu 1(satu tahun).</p>	24/12/2024	<p>1. Tindak Lanjut Aduan: Setelah menerima aduan, pihak sekolah melalui komite sekolah telah mengundang Bapak Eka Agus Setiawan (pengadu) untuk berdiskusi secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, komite sekolah memberikan penjelasan secara rinci terkait kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh SD Negeri 1 Sanggreman.</p> <p>2. Hasil Diskusi dan Kesepahaman: Berdasarkan hasil penjelasan yang telah diberikan, Bapak Eka Agus Setiawan menyatakan telah memahami dan menyetujui program sekolah. Beliau juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani secara sukarela.</p>	30/12/2024	selesai	6 hari

100				<p>3. Komitmen Pihak Sekolah: SD Negeri 1 Sanggreman berkomitmen untuk selalu melibatkan seluruh pihak, termasuk orang tua siswa, dalam pelaksanaan program sekolah. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan memiliki transparansi, manfaat yang jelas, dan dukungan penuh dari masyarakat.</p> <p>Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Eka Agus Setiawan. Masukan dari orang tua siswa merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 1 Sanggreman. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin demi kemajuan sekolah dan kesejahteraan siswa.</p>			
-----	--	--	--	--	--	--	--

101	#f2400005277	Study tour dari jenjang TK, SD, SMP dihilangkan saja, kegiatan kurang bermanfaat tapi resiko terhadap keselamatan tinggi. Sudah banyak contoh kejadian yang tidak diinginkan menimpa siswa siswi, tapi pihak sekolah tetap saja mengadakan study tour.	31/12/2024	Izin kami sampaikan kegiatan outing class/study tour merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas, peserta didik diajak untuk belajar dengan melihat secara langsung obyek-obyek/sumber belajar, sifatnya sukarela, tidak wajib, tidak memberatkan orang tua/wali. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan panduan berkenaan dengan pembelajaran di luar kelas SD dan SMP di Kabupaten Banyumas Nomor 420/10757/2023 tanggal 15 November 2023 yang berisi rambu-rambu serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan outing class.	31/12/2024	selesai	6 menit
Total Pengaduan Masuk Tahun 2024 : 101 Pengaduan							
Total Pengaduan Selesai Tahun 2024 : 101 Pengaduan							

Purwokerto, 8 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas,



Drs. Joko Wiyono, M.Si  
NIP. 19680217 199303 1 002

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil monitoring mengenai penanganan pengaduan masyarakat tahun 2024 ditemui adanya aduan yang masuk sebanyak 101 aduan masyarakat yang masuk melalui media pengaduan yang disediakan mengenai pelayanan maupun sistem pendidikan dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Meningkatnya jumlah aduan disetiap tahun menjadi indikator semakin banyaknya masyarakat yang peduli mengenai kualitas layanan yang diberikan serta pemerataan informasi terkait publikasi sarana pengaduan yang semakin diketahui oleh masyarakat. Aduan masyarakat yang telah masuk tentu menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan secara optimal kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

#### **4.2. Saran**

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dan evaluasi yang baik antar bidang terkait, tim pengelolaan pengaduan, serta petugas pelayanan yang menangani. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan setiap penanganan pengaduan kepada pengadu yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui admin Lapak Aduan Banyumas sebagai media penanganan pengaduan secara elektronik.

Purwokerto, 8 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas,



Drs. Joko Wiyono, M.Si  
NIP. 19680217 199303 1 002